

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menempati tempat sentral dalam pembangunan. Pendidikan sebagai kegiatan warisan budaya merupakan proses transformasi nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai budaya tersebut telah mengalami proses transformasi dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang dan mendatang.

Pendidikan Nasional berperan dalam mengembangkan kemampuan untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa yang beradab, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (UU No 20 Tahun 2003).

Makna dari fungsi dan tujuan pendidikan tersebut adalah bahwa pendidikan diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan kepribadian, kecerdasan, keterampilan, dan wawasan yang lebih luas, sehingga potensi diri dapat ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal. (Wahyudi, 2013).

Masalah yang saat ini dihadapi dalam bidang pendidikan adalah mengenai kualitas layanan akademik di tingkat sekolah. Di era globalisasi seperti sekarang,

masyarakat menginginkan pendidikan yang bermutu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, dan efisien dalam proses pembangunan, agar negara tidak tertinggal dalam persaingan global saat ini. Kualitas mengacu pada sejauh mana produk atau layanan sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga produk atau layanan tersebut diterima tanpa kekurangan yang dapat mengecewakan atau merugikan pelanggan.

Kualitas layanan akademik adalah evaluasi terhadap pengalaman layanan akademik yang diterima oleh siswa atau masyarakat. Jika pengalaman tersebut memenuhi atau melebihi harapan yang telah diharapkan, maka layanan dianggap berkualitas atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Layanan akademik pada dasarnya adalah upaya satuan pendidikan untuk memberikan dukungan kepada sumber daya pendidikan seperti guru, tenaga administrasi, siswa, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas seperti Sistem Informasi Manajemen, ruang belajar dilengkapi multimedia, lingkungan yang bersih, serta staf yang ramah dan sopan. Ini mencakup juga hubungan yang baik antara sekolah dan peserta didik, untuk mencapai kompetensi sesuai standar yang ditetapkan.

Ada dua faktor yang menyebabkan upaya pendidikan kurang berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan cenderung berorientasi pada input. Strategi ini mengasumsikan bahwa dengan memenuhi semua input pendidikan seperti penyediaan buku pelajaran, fasilitas multimedia, dan pelatihan untuk guru serta tenaga kependidikan lainnya, secara otomatis lembaga pendidikan akan

menghasilkan output yang berkualitas sesuai harapan. Kedua, pengelolaan pendidikan lebih berfokus pada level makro, yang diatur oleh birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang direncanakan di tingkat pusat tidak selalu berjalan optimal di tingkat mikro, yaitu di sekolah itu sendiri.

Diperlukan sosialisasi tentang kurikulum yang berlaku pada semua sumber daya pendidikan agar tercipta tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tujuan pendidikan sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang maknanya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Masih ada sekolah belum dapat memberikan kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang diharapkan, banyak kendala dialami sekolah, seperti: masih ada guru yang belum memenuhi standar S1, ada karyawan yang belum menguasai komputer sehingga memperlambat proses administrasi sekolah, artinya memperlambat proses pelayanan kepada pelanggan, sarana prasarana yang belum sesuai standar, peran Komite yang belum maksimal dan masih banyak lagi.

Sekolah sebagai sistem organisasi terbuka memiliki tujuan agar kualitas layanan akademik perlu diperhatikan oleh seluruh lembaga pendidikan. Masalah kualitas dalam era sekarang ini perlu mendapat perhatian dalam suatu organisasi, terutama organisasi dalam lembaga pendidikan. Upaya menjadikan organisasi tetap bertahan, penjaminan kualitas menjadi suatu keharusan untuk diterapkan dalam suatu organisasi dalam kerangka manajemen kualitas terpadu (*Total Quality Management*).

Paradigma sistem pendidikan nasional telah mengalami pergeseran berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan pendidikan, yang mengubah sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan diperkenalkannya

model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol dan menjaga kualitas layanan pendidikan, meningkatkan kemandirian sekolah, dan mendorong tingginya tingkat akuntabilitas publik. Ini merupakan bagian dari reformasi pendidikan yang memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Penerapan model ini sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mendukung pendidikan, sehingga diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan, pemerintah telah membentuk wadah partisipasi melalui Permendikbud No. 75 Tahun 2016, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan dukungan mereka.

Wadah yang dimaksud adalah Komite Sekolah pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan (sekolah). Dengan adanya Komite Sekolah, tingkat kepedulian dan peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah mewujudkan pendidikan berkualitas diharapkan akan lebih meningkat.

Komite Sekolah adalah wadah atau badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah (Permendikbud No. 75 Tahun 2016). Masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan, antara lain: belum semua masyarakat dan *stakeholders* pendidikan di daerah memahami

Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Belum semua daerah dan sekolah melaksanakan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 sebagaimana mestinya. Masih banyak masyarakat belum paham tentang Komite Sekolah, bahkan dampak dari Komite Sekolah belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan dan hasil belajar. Faktor-faktor seperti *knowledge* dan *understanding* oleh para *stakeholder* mengenai peran masing-masing, mekanisme struktural yang sengaja menyumbat keikutsertaan mereka dalam proses pengelolaan pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi mereka menjadi *predicator* bagi efektifnya peran Komite yang mengaburkan peran ideal Komite Sekolah, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pendidikan tahun 2003.

Komite Sekolah berperan sebagai wadah resmi untuk mengakomodasi dan membahas isu-isu terkait dengan kelembagaan sekolah. Ini termasuk menyusun strategi perencanaan sekolah, mendorong upaya untuk meningkatkan standar pelayanan minimal sekolah, mendukung pelaksanaan monitoring internal sekolah (*self-assessment*), dan membahas hasilnya dalam musyawarah Komite Sekolah. Komite juga bertugas memonitor kinerja sekolah, termasuk manajemen sekolah, kepemimpinan yang dilakukan Kepala Sekolah, kualitas pengajaran dan pembelajaran, prestasi peserta didik, tata tertib yang berlaku sekolah, serta pencapaian dalam bidang akademik ataupun non-akademik.

Persoalan yang masih sering terjadi peran Komite Sekolah yang belum maksimal, sedangkan Komite Sekolah memiliki fungsi terhadap upaya memajukan sekolah, memantau manajemen sekolah yang akan berpengaruh pula terhadap peningkatan kualitas layanan akademik. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut melalui sebuah penelitian yang berfokus pada judul "*Pengaruh Komite*

Sekolah terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Akademik di SD Negeri Guslah I Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan“.

1.2. Rumusan Masalah

Identifikasi dan pembatasan masalah tentang pengaruh Komite Sekolah terhadap peningkatan kualitas layanan akademik di SD Negeri Guslah I Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh Komite Sekolah terhadap peningkatan kualitas layanan akademik di SD Negeri Guslah I Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan?
2. Adakah pengaruh Komite Sekolah di SD Negeri Guslah I Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan?
3. Adakah kualitas pelayanan akademik di SD Negeri Guslah I Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui adakah pengaruh Komite Sekolah terhadap peningkatan kualitas layanan akademik di SD Negeri Guslah I Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.
2. Mengetahui adakah pengaruh Komite Sekolah di SD Negeri Guslah I Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.
3. Mengetahui adakah kualitas pelayanan akademik di SD Negeri Guslah I Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung dalam bidang pendidikan.

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi Komite Sekolah untuk meningkatkan peran mereka.
- b. Berkontribusi dalam literatur ilmiah untuk meningkatkan kualitas layanan akademik di Sekolah Dasar.
- c. Menjadi acuan dan referensi bagi penelitian-penelitian mendatang yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan akademik, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam bidang ini.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pengaruh Komite Sekolah terhadap layanan akademik

b. Bagi Komite Sekolah

Diharapkan memperoleh pemahaman serta dapat meningkatkan peran komite sekolah dengan lebih baik.

c. Bagi Sekolah

Sebagai bahan pertimbangan dalam menjalin hubungan yang baik dengan komite sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan akademik.

1.5. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah:

- a. Komite Sekolah (X) adalah sebuah badan independen yang menampung partisipasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Indikatornya antara lain: pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung. (Nasution, 2007)
- b. Kualitas layanan akademik (Y), merupakan faktor untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Indikatornya antara lain: kehandalan, koresponsifan, jaminan, empati, dan bukti fisik. (Fandy Tjiptono, 2005)